

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Buku

- Alfitra. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses, 2011.
- Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Sleman: Penerbit Deepublish, 2020.
- Arif, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2018.
- Asra, Riadi. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Bahan Ajar (Hanjar) Kode Etik Profesi Polri*. Jakarta: Bagian Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, 2020.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2017.
- Ellis, Susan. *Law Dictionary*. Canada: Willey, Hoboken, NJ, 2006.
- Gaussyah. *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sisitem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2014.

- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2017.
- Prodjodikoro, Wirdjono. *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung, 1967.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1995.
- Soetama, Hendar. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: Penerbit PT Alumni, 2011.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Penerbit IKAPI, 2021.
- Untung, I Made, Imran, and Andi. *Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia*. Gowa: Pusaka Almaida, 2021.
- Viswandro, Maria, and Bayu. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Arfiani, Syofirman, and Sucey. “Problematika Penegakan Hukum Delik Obstruction of Justice dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. *Unes Journal of Swara Justicia* Vol. 6, No. 4, 2023. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4>.
- Asshiddiqie, Jimly. “Upaya Perancangan Undang-Undang tentang Larangan Merendahkan Martabat Pengadilan”. *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 4, No. 2, 2015. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.4.2.2015.199-222>.
- Benuf, K and Azhar, M. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 7, No. 1, 2020. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Christian A.M, Vecky, Marthin,, “Upaya yang Menghalang-halangi Penyidikan dan Penuntutan untuk Kepentingan Orang Lain Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Lex Administratum* 10, No. 5, 2022.
- Disemadi, Hari Sutra. ““Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum””. *Jurnal Judicial of Review* Vol. 24, No. 2, 2022. <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

- Doramia, Anggita. “Urgensi Peran Aktif Hakim pada Peradilan Tindak Pidana Informasi Elektronik”, *Credipo* 1, No. 1 (Juli, 2019):9 <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.1-12>.
- Ediberto, Melissa, and Dianet. “Collusion, Obstruction of Justice, and Impeachment”. *Journal of Legislation* Vol. 45, No. 1, 2018. <https://scholarship.law.nd.edu/jleg/vol45/iss1/2>.
- Fathoni, Nur, Choirul, and Nety. “Implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”. *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 3, No. 1, 2023. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.6972>.
- Gulo, Nimerodi and Kurniawan, Ade. Disparitas dalam Penjatuhan Pidana, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 3, (2018).
- Junaidi, M and Gumilang, A. “Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 13, No. 1 (Mei 1, 2023) <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v13i1.6967>.
- Mardhatilla, Amelia. “Tindak Pidana Obstruction of Justice oleh Kepolisian dalam Upaya Menangkap Kejahatan”. Vol. 1, No. 1, 2023. <https://online-journal.unja.ac.id/jols/article/view/24055>.
- S, Livia Mustika. “Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Verstek Jurnal Hukum Acara* 10, No. 2 (2021): 439, <https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67696>.
- Sopyan, Yayan. “Contempt of Court in Indonesia: The Meaning, Root of Problems and Its Alternative Solutions”. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 20, No. 1, 2020. 85 10.0.81.148/1.jdh.2020.20.1.2731.
- Sularto. “Pengaturan Tindak Pidana Contempt of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia”. *Diponegoro Law Jurnal* Vol. 6, No. 2, 2017. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.19543>.
- Werluka, L. “Alat Bukti yang Sah dalam Pembuktian Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)”, *Jurnal Belo* 4, No. 2. Juli, 2019.

Berita dan Surat Kabar

- Akil Mochtar. “Supremasi Hukum untuk Kemakmuran”. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, September 17, 2023, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8923#:~:text=Supre>

[masi%20hukum%20merupakan%20upaya%20menegakkan,manapun%2C%20termasuk%20oleh%20penyelenggara%20negara.](#)

“Frasa Tidak Tercantum, Uji UU Tipikor Tidak Dapat Diterima”. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Mei 21, 2019.

“Jamin Ginting: Kemungkinan Vonis Hendra & Agus Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa”, *MetroTV News*, Februari 23, 2023, diakses dari <https://www.metrotvnews.com/play/KXyC9apn-jamin-ginting-kemungkinan-vonis-hendra-agus-lebih-tinggi-dari-tuntutan-jaksa>.

“Rangkuman Drama Panjang Kasus Pembunuhan Brigadir J yang Buat Hakim Berikan Vonis Hukuman Mati pada Ferdy Sambo” *TvOneNews*, Februari 13, 2023, diakses dari <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/100496-rangkuman-drama-panjang-kasus-pembunuhan-brigadir-j-yang-buat-hakim-berikan-vonis-hukuman-mati-pada-ferdy-sambo?page=all>.

“Samakan Persepsi Aparat Penegak Hukum di KUHP Baru”. *Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau, Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara*, Agustus 09, 2023.

“Vonis Ringan 6 Anak Buah Sambo si Kasus Obstruction of Justice, Peluang Kembali ke Polri Terbuka?”, *Liputan 6*, Maret 1, 2023, diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/5220368/headline-vonis-ringan-6-anak-buah-sambo-di-kasus-obstruction-of-justice-peluang-kembali-ke-polri-terbuka>.